

# Perbedaan Persepsi Penyelenggara Nagari Luhak dan Rantau terhadap Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif

Oleh: Yasril Yunus

## ABSTRACT

*The Systems of Nagari Government in Minangkabau West Sumatra still exist both before the arrival of Dutch colonial and after independence of Indonesia in accordance with the development of the Indonesian government system. So also this time, after a change of a very basic government system. This study aimed to determine the differences in the perception of "luhak" and "rantau" nagari government administrators toward participatory governance model. The method used to determine this difference is a combination of descriptive statistical analysis and interactive models of analysis. The results of this study indicate that there is only a little difference in the perception between the two Nagari administrators toward the participatory governance model. In other words, the difference between the two is not so obvious.*

**Kata Kunci:** Persepsi, Nagari, Model Pemerintahan Nagari

## I. PENDAHULUAN

Perpindahan dari *nagari* ke desa pada masa Orde Baru merupakan sebuah *culture shock* di Sumatera Barat, karena perubahan yang terjadi tidak hanya sekedar perubahan struktural, tetapi sekaligus juga perubahan orientasi dan filosofinya<sup>1</sup>. Setelah reformasi, desa dikembalikan lagi ke bentuk *nagari*. Akibat kedua kejadian itu, berbagai konflik antara nilai adat dengan nilai pemerintahan modern bermunculan. Misalnya, Fatmariza<sup>2</sup>

menemukan bahwa nilai demokrasi modern yang menempatkan kesetaraan gender telah berbenturan dengan nilai adat yang tidak memfasilitasi perempuan menjadi pemimpin. Syafnil Effendi<sup>3</sup> juga melihat bahwa kendala perubahan desa ke nagari tidak diiringi oleh perubahan sikap mental SDM eksekutif nagari yang masih berbudaya birokratik (anti-demokrasi). Yasril

<sup>1</sup> Naim, Muchtar. 1990. "Nagari versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural". *Jurnal Nagari: Desa dan Pembangunan di Sumatera Barat*. Padang: Genta Budaya.

<sup>2</sup> Fatmariza. 2003. "Kesetaraan Gender: Langkah Menuju Demokratisasi Nagari". *Jurnal Demokrasi*. Vol. II No. 1 April

2003. Padang: Pusat Kajian Civics FIS UNP.

<sup>3</sup> Effendi, Syafnil. 2003. "Profil Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Eksekutif Nagari di Sumatera Barat". *Jurnal Demokrasi*. Vol. II No. 1 April 2003. Padang: Pusat Kajian Civics FIS UNP.

Yunus<sup>4</sup> menemukan pula bahwa telah terjadi tarik menarik antara gaya otoritarian dengan gaya demokratik sepanjang sejarah manajemen Pemerintahan Nagari. Begitu juga halnya Helmi Hasan<sup>5</sup> yang menemukan bahwa prinsip kebersamaan (*badunsanak*) yang dimiliki adat telah menipis dalam nagari. Perbedaan antara nilai kultur dalam sistem pemerintahan nagari yang ideal menurut Yasril Yunus<sup>6</sup> belum diadopsi dalam sistem pemerintahan nagari yang diterbitkan dalam Perda Kabupaten maupun provinsi di Sumatera Barat. Ada indikasi belum sinerginya nilai-nilai adat yang diyakini masyarakat dengan berbagai nilai yang sedang diapresiasi pmda (lokal), nasional dan global. Sementara Dasman Lanin<sup>7</sup> mene-

mukan bahwa nilai budaya Minang yang integral dalam sistem Pemerintahan Nagari (terutama lembaga LAN) telah menjadi modal sosial yang nyata dan telah bekerja sebagai spirit yang alamiah pada pelaksanaan Pemerintahan Nagari. Hal tersebut disadari oleh banyak pihak. Pada level Pemerintahan Provinsi pasal 28 Perda Provinsi Sumbar No. 2 Tahun 2007 menyatakan bahwa “KAN berkedudukan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan masyarakat adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat”.

Penelitian ini ingin melihat perbedaan persepsi antara penyelenggara Nagari Luhak dan Nagari Rantau terhadap model Pemerintahan Nagari yang partisi-patif. Penelitian ini dilakukan pada satu nagari *luhak* di Kabupaten Tanah Datar dan satu nagari *rantau* di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat

---

<sup>4</sup> Yunus, Yasril. 2001. “Pemerintahan Nagari di Era Orde Baru (Persepsi Pemerintahan dan masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dalam Kaitannya dengan Otonomi Daerah”. *Tesis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.

<sup>5</sup> Hasan, Helmi. 2004. “Demokrasi Adat di Minangkabau sebagai Modal Sosial Lokal dan Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya: Suatu Studi di Kanagarian Situjuh Gadang Kabupaten Lima Puluh Kota”. *Tesis*. Padang: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.

<sup>6</sup> Yunus, Yasril. 2008. “Model Pemerintahan Nagari Dengan Pertimbangan: Nilai Demokratisasi (Otonomi Daerah dan HAM) dan Nation State”. *Laporan Penelitian*. Padang: Universitas Negeri Padang

<sup>7</sup> Lanin, Dasman. 2006. “Konservasi Nilai Kultural Adat Minangkabau Melalui Kebijakan Otonomi Nagari”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Tahun ke 12 No. 059 ISSN 0215-2673 Maret 2006. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.

## II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Van Vollenhoven<sup>8</sup> menyatakan, desa adalah ciptaan Indonesia asli, di Sumatera Barat disebut *Nagari* yang tersusun dari: *mamak, kerapatan famili, penghulu, kerapatan suku, kerapatan nagari dan tuo rapat*. Dengan susunan ini warga tenteram, stabil dan dinamis<sup>9</sup>. Muchtar Naim<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Dalam Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>9</sup>Hasbi, Mohammad. 1990. “Intervensi Negara Terhadap Komunitas Nagari di Minangkabau” *Jurnal Nagari, Desa, dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Padang: Yayasan Genta Budaya.

<sup>10</sup> Naim, Muchtar. 1990, *Op cit*.

melihat nagari adalah embrional (miniatur) sebuah negara (republik kecil), atau disebut Kato<sup>11</sup> sebagai *sel contained* dan *tribel society* beragam dengan primordial ikatan darah dan adat, yang efektif secara struktural-fungsional. Soerjono Soekanto<sup>12</sup> mengatakan, persekutuan masyarakat adat (desa) adalah suatu negara, yang disebut Selo Soemardjan<sup>13</sup> sebagai “*dorps republiek*”.

Nagari berbasis demokrasi asli, oleh Santoso<sup>14</sup> disebut sebagai *oer-democratie*. Hazairin<sup>15</sup> menyebutnya sebagai kesatuan hukum masyarakat yang sanggup berdiri sendiri, kesatuan penguasa dan lingkungan hidup kolektif, tetapi nagari kata Hasbi<sup>16</sup> dipengaruhi Hindu yang otokratik, tercermin dalam *Koto Piliang*, sementara *Budi Caniago* bertahan dalam sistem yang demokratik, kemudian diperkuat oleh nilai Islam. Menurut Muchtar Naim<sup>17</sup>, otoritas nagari memperlihatkan *centrifugal tendency* dan *tribal* di

beberapa nagari. Sementara menurut Benny Adrain<sup>18</sup>, pemimpin tidak terkristal sebagai mitos *raja yang dipertuan*, akibatnya kekuasaan di Minangkabau tidak terpusat.

Penelitian Yasril Yunus<sup>19</sup> telah menemukan model-model pemerintahan nagari sejak sebelum Belanda. Model-model itu mengikuti zamannya masing-masing, dipengaruhi berbagai variabel, dan mempengaruhi gaya manajemen pemerintahan pada priode masing-masing. Model-model itu tidak sepi dari berbagai konflik nilai, seperti temuan Fatmariza<sup>20</sup> bahwa kendala demokrasi dalam kesetaraan gender tidak hanya dari sisi politik tapi juga dari nilai patriarki yang masih kental. Syafnil Effendi<sup>21</sup> menemukan bahwa SDM eksekutif nagari belum mengarah ke cita-cita reformasi yang demokratik, masih memiliki sikap mental birokratik seperti desa sebelumnya. Dasman Lanin<sup>22</sup> menemukan pula bahwa belum terdapat keserasian antara nilai-nilai ketatanegaraan adat dengan

---

<sup>11</sup> Kato, Tsuyoshi. 1977. “Social Change in A Centrifugal Society: The Minangkabau of West Sumatra”. *Disertasi Ph D.* Cornell University

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

<sup>13</sup> Selo Soemardjan. 1992. “Otonomi Desa: Apakah Itu?”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2. hal. 1-16. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>14</sup> Santoso, Priyono Budi. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Prespektif Kultural dan struktural*. Jakarta: Grafindo Persada.

<sup>15</sup> Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tinta Mas.

<sup>16</sup> Hasbi, Mohammad. 1990, *Op cit.*

<sup>17</sup> Naim, Muchtar. 1990, *Op cit.*

---

<sup>18</sup> Adrain, Benny. 1995. “Birokrasi di Sumatera Barat: Transisi dari Tradisional ke Modern (Suatu Tinjauan Sosiologi Politik)”. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas.

<sup>19</sup> Yunus, Yasril. 2007. “Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau”. *Jurnal Demokrasi*. FIS UNP Vol. VI, No. 2, Oktober 2007.

<sup>20</sup> Fatmariza. 2003, *Op cit.*

<sup>21</sup> Effendi, Syafnil. 2003, *Op cit.*

<sup>22</sup> Lanin, Dasman. 2003. “Komitmen dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Nagari dalam Operasionalisasi Tugas Pokok dan Fungsinya di Sumatera Barat”. *Jurnal Demokrasi* Vol. II No. 2114, 1 April 2003. Pusat Kajian Civics FIS UNP.

nilai-nilai ketatanegaraan modern, bahkan Helmi Hasan<sup>23</sup> menemukan bahwa kendala pemerintahan disebabkan; (1) birokrat nagari mengeluarkan peraturan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi adat, baik yang berhubungan dengan kelembagaan maupun proses pengambilan keputusan; (2) kondisi ekonomi dan pengetahuan masyarakat yang rendah sering menjadi kendala dalam berpartisipasi di nagari. Tentang aktor falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), Dasman Lanin<sup>24</sup> menemukan kesenjangan antara aktor ABS-SBK sebagai pekerja sosial yang sukarela dengan karakter tugas pemerintahan modern mereka di nagari. Benda-Beckmann & Franz<sup>25</sup> mengemukakan “*the return to the nagari has led to a new interest in adat as a legitimation of political authority*”.

Disamping temuan di atas, telah ditemukan pula bahwa modal sosial adat tetap terpelihara, seperti temuan Dasman Lanin<sup>26</sup> bahwa kemauan Lembaga Adat Nagari yang menjalankan peran konservasi nilai kultural, ternyata memiliki potensi yang tinggi dalam menjamin terlaksananya

otonomi nagari di bidang resolusi konflik *sako* dan *pusako*.

Setelah semua literatur dan hasil penelitian di atas dimanfaatkan dalam merancang model Pemerintahan Nagari dengan pertimbangan nilai demokratisasi, otonomi daerah, HAM dan *nation state*, maka hasil penelitian tahap pertama telah melahirkan sebuah model yang mengakomodasi berbagai nilai tersebut yang kemudian menjadi basis akademik bagi penyelenggara nagari terhadap Pemerintahan Nagari yang ideal.

Secara konseptual model yang akan diterapkan pada penelitian tahap kedua itu, ternyata mengapresiasi nilai keadatan pada manajemen pemerintahan nagari, telah menghormati hak dan kewajiban asal usul komunitas adat atau hak asli masyarakat adat, terutama yang berkenaan dengan hak politik di nagari untuk menentukan wali nagari, sesuai atau disesuaikan dengan hak asal usul adat bernagari yang sudah menjadi tradisi dan pengetahuan asli mereka (*indigenous knowledge*). Kekuatan hak politik asli bernagari secara adat, telah dimunculkan dalam model secara agak substantif dan dominan dengan memandang bahwa *indigenous knowledge* tersebut lebih partisipatif dalam takaran dan tatanan adat bernagari. Dengan demikian Pemerintahan Nagari akan memiliki komunikasi langsung, transparan dan akuntabel pada publik dengan suku sebagai subsistem-geonologis nagari.

### III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penekatan *mixing*, antara kualitatif dan kuan-

---

<sup>23</sup> Helmi Hasan. 2004, *Op cit*.

<sup>24</sup> Lanin, Dasman. 2005. “Profil Penyelenggara Falsafah ABS-SBK di Nagari se Sumatera Barat dan Implikasinya”. *Jurnal Pemikiran Islam dan Pendidikan Al-Ta’lim* Vol. XII No.22 Th.2005, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang.

<sup>25</sup> Benda - Beckmann, & Franz, K. 2001. “State, Religion and Legal Pluralism: Changing Constellations In West Sumatra (Minangkabau) And Comparative Issue”. *Working Paper* No.19. Max Planck Intitute For Social Anthropology. ISSN: 615-4568.

<sup>26</sup> Lanin, Dasman. 2006, *Op cit*.

titatif, dengan langkah-langkah; (1) melakukan orientasi tentang persepsi pada Penyelenggara Nagari, (2) FGD sekaitan persepsi pada Penyelenggara Nagari.

Analisis pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan *interactive model of analysis*. Peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu data reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan<sup>27</sup>. Sedangkan data kuantitatif tentang persepsi masyarakat dan anak nagari terhadap model yang diterapkan dan kecocokannya dengan kebutuhan dan aspirasi mereka dianalisis melalui statistik yang menggunakan formalasi persentase dan *mean*.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **Perbedaan Persepsi Penyelenggara Nagari terhadap Pemerintahan Nagari yang Partisipatif.**

Kebijakan Pemda Kabupaten Tanah Datar dalam mengimplementasikan Perda Provinsi No 2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari adalah dengan menerbitkan Perda Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Sedangkan di Pasaman Barat ini adalah Perda No. 2 tahun 2008. Dalam pasal 2 Bab II Perda ini, nagari adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filo-ofi adat Minangkabau (*Adat Ba-*

*sandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah = ABS-SBK*).

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Nagari, Pemerintahan Daerah kabupaten Pasaman Barat, S.Ginting:

Penerapan Sistem Pemerintahan Nagari dalam kebijakan Pemerintahan Daerah di Pasaman Barat mengikuti Perda Pasaman Barat No 2 tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari, meskipun nagari di Pasaman Barat penduduknya berasal dari berbagai etnik ... etnik yang dominan pada nagari di Pasaman Barat ini, umumnya masih etnik Minangkabau, namun pada nagari tertentu penduduknya adalah multi etnik, ada yang berasal dari Jawa/Sunda, Batak/Mandahiling dan Minangkabau.

Sedangkan menurut Marwen, Kepala Bahagian Pemerintahan Nagari Pemda Tanah Datar di kantornya ada yang khas dari Perda ini dibanding dengan Perda kabupaten lainnya. Ia mengemukakan bahwa:

Kami menyusun Perda nagari, tidak hanya sekedar mengatur sebatas pemerintahan saja, akan tetapi menyangkut nagari secara keseluruhan. Ini bermakna bahwa semua aspek kehidupan masyarakat dapat ditampung, diserap oleh Perda Tanah Datar No. 4 tahun 2008 ini. Semuanya adalah dalam rangka mencakup atau menjangkau nagari yang berdasarkan ABS-SBK (*Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah*), yang mungkin Perda ini agak berlainan nuansanya dengan Perda Pro-

<sup>27</sup> Miles, Mathew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerjemah: T. Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

vinsi Sumatera Barat yang hanya mengatur persoalan Pemerintahan Nagari saja.

Di Kenagarian Batu Taba sebelum FGD dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan berbagai wawancara dengan unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Ninik Mamak (KAN) Ninik Mamak Dahlan Dt. Bijo Anso NT (70 tahun) di hadapan ketua Alim Ulama H.M. Noer, menekankan bahwa:

KAN sebagai wadah organisasi federatif geneologis pada tingkat nagari dan Ninik Mamak atau penghulu suku sebagai organisasi geonologis otonom yang ada di bawahnya. Minimal harus ada empat suku atau organisasi geonologis tingkat suku dalam sebuah nagari. Setiap suku secara hirarkhis didukung oleh organisasi jurai dan organisasi paruik dan rumah. Setiap tingkat organisasi geneologis tersebut ada pimpinannya yang disebut mamak. Kalau tidak ada organisasi suku yang seperti ini maka nagari tidak memenuhi syarat menjadi nagari secara adat. Hakikat nagari tidak terpenuhi. Nagari jadi-jadian namanya. Semua anak kemenakan yang ada dalam nagari masuk semuanya dalam struktur organisasi geneologis ini. Tidak ada orang yang tinggal di sebuah nagari yang tidak memasuki sebuah organisasi geneologis itu. Jadi tidak ada nagari jika tidak ada setidaknya empat suku.

Sejalan dengan itu Wali Nagari Kinali Pasaman Barat menjelaskan tentang hal ini bahwa:

Di Kinali ini tidak ada orang Jawa, tidak ada orang Sunda, tidak ada orang Batak, tidak ada orang Mandahiling. Yang ada adalah orang Minangkabau yang berasal dari Jawa, orang Minangkabau yang berasal dari Sunda, yang berasal dari Batak dan Mandahiling, dan itupun sudah diterima sebagai sebuah konsep kebersamaan di kalangan mereka. Konsep seperti ini kita sosialisasikan dan kita kembangkan terus menerus. Dengan demikian terjalinlah kerjasama yang saling mendukung dan saling menghargai di dalam masyarakat nagari Kinali.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa meskipun masyarakat nagari-nagari di Pasaman Barat penduduknya memiliki etnik yang berbeda-beda dan berasal dari latar budaya yang berlainan, namun dapat mengakui budaya Minangkabau dalam hidup bernagari, budaya adat Minangkabau tetap dihormati dan ditaati sebagai tatanan hidup bersama di nagari. Secara formal juga diakui dalam aturan formal yang dirumuskan oleh masyarakat melalui DPRD dan Bupati dalam bentuk Perda Pasaman Barat, seperti yang telah dikemukakan di atas.

#### **a. Perbedaan Persepsi Tentang Struktur Geneologis**

Bila dicermati semua penilaian dari semua unsur baik di Nagari Batu Taba Tanah Datar, maupun di Nagari Kinali Pasaman Baat maka diperoleh gambaran sebagaimana terlihat dalam tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1**  
**Perbedaan Persepsi Tentang Aspek Struktur Geneologis**

No	Unsur	Nagari Batu Taba		Nagari Kinali		Keterangan
		Rerata	Skor	Rerata	Skor	
1.	Ninik Mamak	208	3,8	94	3,7	setuju
2.	Cadiak Pandai	94	3,8	93	3,7	setuju
3.	Bundo Kanduang	105	4,2	97	3,8	setuju
4.	Alim Ulama	99	4,0	107	4,3	Setuju
5.	Pemuda	88	3,5	100	4,0	Setuju
6.	Tokoh Jawa	-	-	105	4,1	Setuju
7.	Tokoh Mandahiling	-	-	95	3,8	Setuju
		594	3,8	692	3,9	

Dari tabel 1 di atas dapat dipahami bahwa secara keseluruhan masyarakat Batu Taba setuju dengan penguatan peranan dan fungsi KAN dan penghulu suku, dan akan lebih setuju atau sangat setuju jika mereka memiliki SDM yang memenuhi tuntutan kalangan muda (Pemuda) dan Bundo Kanduang. Kedua unsur ini melihat kelemahan persepsi perinsip penguatan KAN dan penghulu suku ini, akan terkendala pada kemampuan SDM yang ada pada KAN dan penghulu itu sendiri. Hal ini terungkap juga dalam FGD dan wawancara yang dilakukan bahwa, perinsip pejabat KAN dan penghulu suku yang menjadi masalah adalah "*karambia tumbuh di mato, mamahek di barihnyo*"<sup>28</sup>. Artinya penghulu dan KAN dijabat berdasarkan keturunannya, yang SDM-nya masih dipertanyakan kemampuannya. Akhirnya dapat diberi makna bahwa secara nilai keadatan dan filosofi ABS-SBK diharapkan persepsinya oleh masyarakat nagari, namun perlu penyesuaian SDM dengan tuntutan dan tantangan dunia modern yang semakin tinggi.

Sedangkan di Kenagarian Kinali dapat dipahami bahwa penguatan

KAN dan aspek struktur geneologis dalam struktur Pemerintahan Nagari di Kinali, Pasaman Barat, ternyata disetujui oleh semua unsur. Unsur Alim Ulama yang sedikit cenderung sangat setuju, yang diiring oleh unsur Jorong dan etnik Jawa, meskipun dari unsur Cadiak Pandai dan Ninik Mamak sedikit kurang percaya diri untuk penguatan KAN ini. Sejalan dengan temuan tersebut temuan yang dikemukakan oleh Syafnil Effendi<sup>29</sup> bahwa SDM eksekutif nagari belum mengarah ke cita-cita reformasi yang demokratik, masih memiliki sikap mental birokratik seperti desa sebelumnya. Begitu juga halnya dengan Helmi Hasan<sup>30</sup> yang menemukan bahwa kendala pemerintahan disebabkan pengetahuan masyarakat yang rendah dan hal ini sering menjadi kendala dalam berpartisipasi di nagari.

#### **b. Perbedaan Persepsi Tentang Prinsip-Prinsip Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif**

Dari berbagai persepsi tentang prinsip Pemerintahan Nagari yang diteliti,

<sup>28</sup>FGD tanggal 20 dan 21 September 2009 serta wawancara 2 September 2009 .

<sup>29</sup> Effendi, Syafnil, 2003, *Op cit.*

<sup>30</sup> Hasan, Helmi, 2004, *Opcit.*

maka secara keseluruhan dirangkum dalam sebuah tabel yang dikemukakan

dalam klasifikasi berikut ini.

**Tabel 2**  
**Persepsi Tentang Perinsip-Perinsip Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif Selain Aspek Geneologis**

No	Unsur	Nagari Batu Taba		Nagari Kinali		Keterangan
		Rerata	Skor	Rerata	Skor	
1.	Ninik Mamak	399	3,6	186	3,7	setuju
2.	Cadiak Pandai	185	3,7	181	3,6	setuju
3.	Bundo Kandung	207	4,1	177	3,5	setuju
4.	Alim Ulama	189	3,8	197	3,9	Setuju
5.	Pemuda	184	3,7	197	3,9	Setuju
6.	Tokoh Jawa	-	-	191	3,8	Setuju
7.	Tokoh Mandahiling	-	-	197	3,9	Setuju
Jumlah		1164	3,8	1517	3,8	

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa rerata atau secara umum masyarakat di nagari Batu Taba Kabupaten Tanah Datar nampaknya memiliki persepsi bahwa semua prinsip-prinsip di dalam model Pemerintahan Nagari yang partisipatif dapat diterima, walaupun dalam persepsinya mengalami hambatan yang berpangkal pada (1) Sumber daya manusia KAN yang lemah, (2) koordinasi yang kurang, (3) dikhawatirkan bahwa fungsi dan tugas KAN tidak dipahami dan dijalankan, (4) tidak pedulinya KAN dan Ninik Mamak pada anak kemenakan serta sebaliknya, (5) renggangnya lembaga atau organisasi geneologis secara internal dan (6) kurang berwibawanya pengurus KAN dan Ninik Mamak karena beban (persoalan) ekonomi dan moral yang bersifat pribadi. Seterusnya di Kinali dapat diketahui bahwa secara total penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan Nagari terbukti bahwa semua unsur nagari, baik unsur masyarakat yang ada dalam Bamus dan eksekutif, maupun masyarakat

yang berada di luar Bamus dan eksekutif, yaitu etnik Jawa dan etnik Mandahiling, semuanya setuju dengan penerapan model Pemerintahan Nagari yang dirancang dalam penelitian ini. Dasman Lanin<sup>31</sup> menemukan bahwa nilai budaya Minang yang integral dalam sistem Pemerintahan Nagari (terutama lembaga LAN) telah menjadi modal sosial yang nyata dan telah bekerja sebagai spirit yang alamiah pada pelaksanaan Pemerintahan Nagari. Sekalipun demikian data yang dikemukakan di atas, mereka mengkhawatirkan kemampuan dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) belum mampu menyelenggarakan fungsi mereka secara optimal, sesuai dengan model yang dirancang.

**c. Perbedaan Persepsi Tentang Lembaga yang dianggap efektif mewakili Nagari**

Adapun penilaian masyarakat yang diwakili lima lembaga unsur nagari

<sup>31</sup> Lanin, Dasman, 2006 dan 2007, *Op cit.*

terhadap kombinasi kelembagaan yang ada di dalam nagari, dapat pula

dilihat seperti tergambar dalam tabel 3 berikut.

**Tabel 3**  
**Persepsi Tentang Lembaga yang dianggap efektif mewakili Nagari**

No	Lembaga	Batu Taba		Kinali		Ket
		f	%	f	%	
1.	BPRN dengan unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda	24	80	36	90	
2.	KAN dengan unsur semua Penghulu Suku	6	20	4	10	
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	

Ternyata, tabel 3 di atas menunjukkan bukti bahwa masyarakat Nagari Batu Taba melihat bahwa kombinasi BPRN dengan unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda dipandang sebagai lembaga yang sesuai untuk mewakili mereka di nagari. Mereka menerima kombinasi ini sebesar 80%. Hal ini berbanding dengan kombinasi KAN dengan semua penghulu suku yang ada di nagari sebesar 20%. Di samping itu di Nagari Kinali atas dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga Bamus yang menghimpun unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda lebih diyakini efektif mewakili warga nagari dibandingkan dengan lembaga KAN

**d. Perbedaan Persepsi Tentang Lembaga yang dianggap paling mampu menyelenggarakan Pemerintahan Nagari**

Sementara lembaga yang dianggap paling mampu menurut masyarakat Nagari Kinali menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, di antara kombinasi lembaga bahwa (1) KAN bersama Wali Nagari, (2) KAN bersama Wali Nagari dan Bamus, serta (3) Wali Nagari bersama Bamus, dalam persepsi masyarakat, datanya dapat dikemukakan bahwa persepsi masyarakat Kenagarian Batu Taba tentang lembaga yang dianggap paling mampu menyelenggarakan Pemerintahan Nagari adalah seperti terlihat dalam tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4**  
**Persepsi Tentang Lembaga yang dianggap paling mampu menyelenggarakan Pemerintahan Nagari**

No	Lembaga	Batu Taba		Kinali		Ket
		f	%	f	%	
1.	KAN bersama Wali Nagari	3	10,0	1	2,5	
2.	KAN, Wali Nagari dan BPRN	22	73,3	30	75,0	
3.	Wali Nagari dan BPRN	5	16,7	9	22,5	
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100,0</b>	<b>40</b>	<b>100,0</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Batu Taba lebih cenderung memberikan kepercayaan kepada kombinasi KAN, Wali Nagari dan BPRN sebagai lembaga-lembaga nagari yang melaksanakan secara bersama Pemerintahan Nagari di Batu Taba, dibanding kombinasi KAN bersama Wali Nagari dan juga dibanding Wali Nagari bersama BPRN. Begitu juga di Nagari Kinali bahwa kombinasi KAN bersama Wali Nagari dan Bamus adalah lembaga yang paling dianggap mampu menyelenggarakan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang dirancang dalam penelitian tahap pertama dibanding kombinasi KAN bersama Wali Nagari atau kombinasi Wali Nagari bersama Bamus. Perbandingannya adalah 75% berbanding 2,5% dan 22,5%. Hal ini sejalan dengan temuan Yasril Yunus (2001) bahwa telah terjadi tarik menarik antara gaya otoritarian dengan gaya demokratik sepanjang sejarah manajemen Pemerintahan Nagari.

### **Persepsi Penyelenggara Nagari terhadap Kesesuaian Pelaksanaan Demokrasi Adat, Penyelesaian Konflik dan Kesuksesan Pelaksanaan Penyelenggaraan Nagari**

Dampak dari pelaksanaan Pemerintahan Nagari selama ini terhadap pelaksanaan demokrasi adat, peredam konflik, dan kesuksesan sistem, dapat dilihat secara berturut-turut sebagai berikut:

#### **a. Persepsi Tentang Kesesuaian penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan demokrasi adat**

Dilihat dari pelaksanaan demokrasi adat, baik dalam menentukan pengisian jabatan representasi masyarakat maupun dalam menentukan pengisian jabatan eksekutif, yang secara kultural nilai keadatan masih dianut oleh masyarakat nagari sebagai hak asli masyarakat di bidang politik, keadaannya di Batu Taba Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dalam distribusi tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5**  
**Perbedaan Persepsi Tentang Kesesuaian penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan demokrasi adat**

No	Lembaga	Batu Taba		Kinali		Keterangan
		f	%	f	%	
1.	Sangat Setuju	2	6,7	1	2,5	
2.	Setuju	9	30,0	10	25,0	
3.	Ragu	10	33,3	19	47,5	
4.	Tidak setuju	9	30,0	8	20,0	
5.	Sangat tidak setuju	0	0,0	2	5,0	
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100,0</b>	<b>40</b>	<b>100,0</b>	

Berdasar tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Nagari Batu Taba penyerapan nilai keadatan ke dalam sistim Pemerintahan Nagari yang mereka nilai, pada umumnya mereka bersepsi bahwa tidak melihat secara pasti bahwa nilai demokrasi

keadatan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ada sebesar 63,3% mereka meragukan dan malah tidak melihat adanya kesesuaian antara nilai demokrasi adat dengan pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang berjalan. Hanya 36,7% saja nilai

demokrasi adat yang terserap dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari atau yang mereka anggap sesuai dengan nilai demokrasi keadatan. Hal ini juga terjadi di Nagari Kinali bahwa penyerapan nilai keadatan ke dalam sistim pemerintahan nagari selama ini, pada umumnya, mereka tidak melihat secara pasti bahwa nilai demokrasi keadatan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ada sebesar 72,5% mereka meragukan dan malah tidak melihat adanya kesesuaian antara nilai demokrasi adat dengan pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang berjalan. Hanya 27,5% saja nilai demokrasi adat terserap dalam Pemerintahan Nagari atau yang mereka anggap sesuai dengan nilai

demokrasi keadatan. Sejalan dengan hal tersebut terdapat indikasi bahwa diindikasikan bahwa belum sinerginya nilai-nilai adat yang diyakini masyarakat dengan berbagai nilai yang sedang diapresiasi pemda (lokal), nasional, dan global.

#### **b. Perbedaan Persepsi Tentang Ketiadaan konflik antar lembaga nagari**

Adapun penilaian mereka terhadap kemampuan model Pemerintahan Nagari yang dijalankan selama ini, mampu meredam konflik atau menyelesaikan konflik yang ada, dapat digambarkan dalam tabel 6 berikut.

**Tabel 6**  
**Persepsi Tentang Ketiadaan konflik antar lembaga nagari berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan**

No	Lembaga	Batu Taba		Kinali		Keterangan
		f	%	f	%	
1.	Sangat Setuju	2	6,7	1	2,5	
2.	Setuju	6	20,0	13	32,5	
3.	Ragu	9	30,0	14	35,0	
4.	Tidak setuju	13	43,3	11	27,5	
5.	Sangat tidak setuju	0	0	1	2,5	
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100,0</b>	<b>40</b>	<b>100,0</b>	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa potensi konflik antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Batu Taba, ternyata dipersepsi oleh masyarakat masih berpotensi sebesar 73,3%. Hanya 26,7% saja dipersepsi dapat menjadi sarana mengatur konflik dan meredam konflik antar lembaga yang ada dalam Pemerintahan Nagari. Akan tetapi agak berbeda di Kenagari Kinali bahwa potensi konflik antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Na-

gari, ternyata dipersepsi oleh masyarakat masih berpotensi sebesar 65%. Hanya 35% saja dapat menjadi sarana mengatur konflik dan meredam konflik antar lembaga yang ada dalam Pemerintahan Nagari.

#### **c. Perbedaan Persepsi Tentang Kesuksesan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari**

Sementara, kemampuan dan kesuksesan penyelenggaraan berdasarkan sistim yang dijalankan, gambarannya dapat diperhatikan tabel 7 berikut:

**Tabel 7**  
**Perbedaan Persepsi Tentang Kesuksesan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan Pemerintahan Nagari yang Partisipatif**

No	Lembaga	Batu Taba		Kinali		Ket
		f	%	f	%	
1.	Sangat Setuju	3	10,0	2	5,0	
2.	Setuju	11	36,7	8	20,0	
3.	Ragu	4	13,3	13	32,5	
4.	Tidak setuju	12	40,0	17	42,5	
5.	Sangat tidak setuju	0	0	0	0,0	
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100,0</b>	<b>40</b>	<b>100,0</b>	

Berdasarkan tabel 7 di atas diketahui bahwa ada sebesar 53,3% masyarakat di Nagari Batu Taba memberikan persepsinya bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Nagari belum mencapai kesuksesan, hanya sebesar 46,7% saja, dan masyarakat mempersepsikan bahwa Pemerintahan Nagari telah diselenggarakan secara sukses. Sementara itu di Nagari Kinali berdasarkan tabel 7 di atas diketahui bahwa ada sebesar 75% masyarakat melihat penyelenggaraan Pemerintahan Nagari belum mencapai kesuksesan, hanya sebesar 25% saja masyarakat mempersepsi bahwa Pemerintahan Nagari telah diselenggarakan secara sukses.

Dari tiga tabel terakhir di atas yaitu tabel 5, 6 dan 7 dapat dipahami bahwa dampak dari penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang selama ini diterapkan belum mampu menyerap nilai-nilai demokrasi keadatan dengan dominan, disamping juga belum mampu menjadi mekanisme meredam dan menyelesaikan konflik antar lembaga dan juga belum mampu menyelenggarakan Pemerintahan Nagari sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat Batu Taba Tanah Datar.

Berdasarkan semua uraian di atas penyelenggara nagari memberikan persepsinya bahwa:

- 1) Persepsi prinsip penyelenggaraan nagari berdasarkan model Pemerintahan Nagari yang partisipatif dilihat dengan pendekatan kuantitatif, pada umumnya visibel dan akseptibel untuk nagari Batu Taba yang memiliki etnik yang homogen Minangkabau. Namun ada kekhawatiran bahwa SDM di kalangan penghulu suku, Ninik Mamak dan KAN belum mampu menyelenggarakannya, dan mereka sendiri mengakui hal yang demikian. Ketidakpercayaan diri itu terungkap juga, secara kualitatif, sebagai hambatan dalam penerapannya sebagai berikut; (a) SDM KAN yang lemah, (b) koordinasi yang kurang, (c) dikhawatirkan bahwa fungsi dan tugas KAN tidak dipahami dan dijalankan, (d) tidak pedulinya KAN dan Ninik Mamak pada anak kemenakan serta sebaliknya, (e) renggangnya secara interen lembaga atau organisasi geneologis dan (f) kurang berwibawanya pengurus KAN dan Ninik Mamak karena beban (persoalan) ekonomi dan moral yang bersifat pribadi.

- 2) Dari segi kelembagaan, Pemerintahan Nagari masih diakui oleh masyarakat. Kombinasi KAN bersama BPRN dan Wali Nagari sesuai dan representatif dalam penyelenggaraan nagari dan lembaga yang ada belum dianggap efektif menyelenggarakan Pemerintahan Nagari di Batu Taba.
- 3) Dampak penyelenggaraan Pemerintahan Nagari selama ini belum dipandang masyarakat sebagai pemerintahan yang mampu menyerap nilai demokrasi keadatan, meredam, dan menyelesaikan konflik antar lembaga, serta belum

mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan sukses.

### **Perbandingan Persepsi Penyelenggara Nagari Rantau dan Nagari Luhak Terhadap Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif**

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, maka ditemukan perbandingan antara dua nagari yang diteliti tersebut dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dapat diketahui perbandingannya untuk masing masing prinsip yang dimiliki model sebagaimana dalam tabel 8 berikut.

**Tabel 8**  
**Perbandingan persepsi perinsip Pemerintahan Nagari berdasarkan model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif**

No	Persepsi Perinsip Model Pemerintahan Nagari	Nagari Kinali (Rantau)		Nagari Batu Taba (Luak)	
		Skor	mean	Skor	mean
1.	KAN Perwakilan Masyarakat Adat Tertinggi di Nagari	164	4,1	123	4,1
2	a. KAN sebagai Penyalur semua kepentingan Anggota Suku	164	4,1	113	3,7
	b. Penghulu Suku sebagai Penyalur Sepenuhnya Kepentingan Anak Kemenakan di Nagari	169	4,2	121	4,0
	c. Kelayakan Penghulu Suku menyalurkan Aspirasi Anak Kemenakan di Nagari	170	4,2	125	4,1
	d. Kapabilitas SDM KAN dalam menyalurkan kepentingan Anak Nagari	127	3,1	91	3,0
3	Penguatan Organisasi Geneologis (mamak rumah, paruik, jurai, suku dan nagari) pada Penyelenggaraan Nagari	174	4,3	134	4,4
4	Kesesuaian Bamus/BPRN dengan Nilai Adat dan Budaya bernagari	150	3,7	109	3,6
5	KAN turut menentukan Peraturan Nagari	157	3,8	120	4,0
6	Anggota Bamus /BPRN perlu diuji kepatutan dan Kepantasannya oleh KAN berdasarkan takaran adat dan Syara'	149	3,7	132	4,4
7	Bamus/BPRN bertanggungjawab kepada masyarakat melalui forum KAN	145	3,6	102	3,4
8	Wali Nagari perlu berkoordinasi dengan KAN untuk pelaksanaan hak-hak asli masyarakat adat	156	3,8	131	4,3
9	Wali Nagari berwenang penuh menentukan semua perangkat Nagari dan jorong	134	3,3	111	3,7
10	Sebelum dipilih langsung, Calon Wali Nagari ditetapkan KAN dengan kriteria norma adat <i>salingka nagari</i>	152	3,8	105	3,5
11	Peraturan Nagari ditetapkan Bamus /BPRN dengan persetujuan KAN	147	3,6	106	3,5
12	Wali Nagari sebagai pelaksana pemerintahan otonom Dekonsentrasi dan pembantuan	153	3,8	117	3,9
	<b>Jumlah</b>	<b>2311</b>	<b>3,8</b>	<b>1734</b>	<b>3,9</b>

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diidentifikasi tiga hal perbedaan antar dua nagari tersebut dalam persepsinya (1) nagari Kinali yang lebih tinggi komitmen persepsinya (2) nagari Batu Taba lebih tinggi komitmen persepsinya dan (3) antara nagari Kinali dan Batu Taba hanya sedikit perbedaannya atau relatif sama persepsinya, meskipun pada umumnya atau secara keseluruhannya kedua nagari ini memiliki tingkat persepsi yang rata-rata sama, atau dengan kata lain bahwa kedua nagari tersebut tidak memiliki perbedaan yang menyolok.

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diidentifikasi tiga hal perbedaan antar dua nagari tersebut dalam penerapannya (1) nagari Kinali yang lebih tinggi komitmen penerapannya (2) nagari Batu Taba lebih tinggi komitmen penerapannya dan (3) antara nagari Kinali dan Batu Taba hanya sedikit perbedaannya atau relatif sama penerapannya, meskipun pada umumnya atau secara keseluruhannya kedua nagari ini memiliki tingkat penerapan yang rata-rata sama, atau dengan kata lain bahwa kedua nagari tersebut tidak memiliki perbedaan yang menyolok.

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa;

- 1) Pada umumnya kedua Nagari memiliki komitmen yang sama-sama setuju dengan penerapan model pemerintahan Nagari yang Partisipatif, meskipun mereka melihat hambatan terbesar itu adalah pada SDM KAN, Organisasi geneologis (*mamak rumah, jurai, paruik, dan penghulu*), serta lemahnya kekuatan

ekonomi dan moral pimpinan organisasi geneologis tersebut.

- 2) Kombinasi kelembagaan nagari yang dianggap mampu mewakili masyarakat adalah Bamus (BPRN) dengan unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, dan Pemuda. Kemudian, yang efektif sebagai penyelenggara nagari itu adalah KAN, Bamus (BPRN) dan Wali Nagari.
- 3) Penyelenggaraan pemerintahan Nagari selama ini belum menyelarap secara memuaskan nilai demokrasi adat, belum mampu meredam konflik dan belum sukses menggerakkan nagari sebagai pemerintahan yang terkecil.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan saran antara lain:

- 1) Perlu ditetapkan Peraturan Nagari (*adaik salingka nagari*) tentang Kode Etik Ninik Mamak, yang bersumber dari Undang-undang Adat yang berhubungan dengan pemangku adat, mulai dari struktur paling bawah yaitu mamak rumah sampai ke ketua KAN, dengan standar moral yang baku sesuai dengan takaran adat dan syarak.
- 2) Perlu dibentuk peradilan adat yang dipimpin oleh hakim adat sepanjang alur dan patut sesuai *adaik salingka nagari* dengan sebuah Peraturan Nagari, dan difasilitasi oleh pemerintahan daerah kabupaten.
- 3) Perlu penguatan SDM organisasi geneologis dengan latihan kepemimpinan adat, modern dan

dengan model kepemimpinan *identity leadership*, supaya dapat mengapresiasi *indegenuous knowledge* (kearifan lokal) dan melahirkan keyakinan-diri (*self-confident*). Disamping juga dapat dilakukan strategi jangka panjang dengan melakukan langkah langkah; (1) tutorial dan *workshop* regular, (2) pembinaan dan pendidikan bagi calon Ninik Mamak di sukunya, bagi yang sudah bisa diidentifikasi sebagai “*karambie tumbuhan di matonyo*”, sebagai *responsibility* Pemerintah Kabupaten terhadap keseriusan bernagari dan (3) Kaderisasi secara adat di nagari, dalam bentuk lembaga pengembangan SDM nagari, melalui penganggaran di nagari oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten.

- 4) Perlu peraturan nagari tentang protokoler Ninik Mamak yang dapat memuliakannya sebagai pimpinan kultural adat, ketika berinteraksi dengan acara formal pemerintahan daerah ataupun pusat, supaya secara nyata pemerintahan daerah memartabatkannya dan tidak menyepelkannya seperti praktek selamanya ini.
- 5) Ada Peraturan nagari yang menyebabkan KAN secara kolektif dapat merekal anggota Bamus atau BPRN, bila melanggar kode etik dan menyimpang dari alur dan patut, tentu melalui peradilan adat. Peraturan nagari tentang kekayaan nagari juga perlu diwujudkan dengan jelas.
- 6) Bazis Nagari perlu dibentuk sebagai sumber dana bagi penyelenggaraan nagari yang ABS-SBK.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adrain, Benny. 1995. “Birokrasi di Sumatera Barat: Transisi dari Tradisional ke Modern”. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas.
- Benda, Beckmann, & Franz, K. 2001. “State, Religion and Legal Pluralism: Changing Constellations In West Sumatra (Minangkabau) And Comparative Issue”. *Working Paper* No.19. Max Planck Intitute For Social Anthropology.
- Effendi, Syafnil. 2003. “Profil Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Eksekutif Nagari di Sumatera Barat”. *Jurnal Demokrasi*. Vol. II No. 1 April 2003.
- Fatmariza. 2003. “Kesetaraan Gender: Langkah Menuju Demokratisasi Nagari”. *Jurnal Demokrasi*. Vol. II No. 1 April 2003.
- Hasbi, Mohammad. 1990. “Intervensi Negara Terhadap Komunitas Nagari di Minangkabau” *Jurnal Nagari, Desa, dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Padang: Yayasan Genta Budaya.
- Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tinta Mas.
- Helmi Hasan. 2004. “Demokrasi Adat di Minangkabau sebagai Modal Sosial Lokal dan Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya: Suatu Studi di Kanagarian Situjuh Gadang Kabupaten Lima Puluh Kota”. *Tesis*. Padang: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.

- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kato, Tsuyoshi. 1977. "Social Change in A Centrifugal Society: The Minangkabau of West Sumatra". *Disertasi Ph D*. Cornell University
- Lanin, Dasman. 2003. "Komitmen dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Nagari dalam Operasionalisasi Tugas Pokok dan Fungsinya di Sumatera Barat". *Jurnal Demokrasi* Vol. II No. 2114, 1 April 2003.
- Lanin, Dasman. 2005. "Profil Penyelenggara Falsafah ABS-SBK di Nagari se Sumatera Barat dan Implikasinya". *Jurnal Pemikiran Islam dan Pendidikan Al-Ta'lim* Vol. XII No.22 Th.2005.
- Lanin, Dasman. 2006. "Konservasi Nilai Kultural Adat Minangkabau Melalui Kebijakan Otonomi Nagari". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Tahun ke 12 No. 059 ISSN 0215-2673 Maret 2006. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Miles, Mathew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerjemah: T. Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Naim, Muchtar. 1990. "Nagari versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural". *Jurnal Nagari: Desa dan Pembangunan di Sumatera Barat*. Padang: Genta Budaya.
- Santoso, Priyono Budi. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Prespektif Kultural dan struktural*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Selo Soemardjan. 1992. "Otonomi Desa: Apakah Itu?". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2. hal. 1-16.
- Selo Soemardjan. 1992. "Otonomi Desa: Apakah Itu?". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2. hal. 1-16. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Yunus, Yasril. 2001. "Pemerintahan Nagari di Era Orde Baru (Persepsi Pemerintahan dan masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dalam Kaitannya dengan Otonomi Daerah)". *Tesis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Yunus, Yasril. 2007. "Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau". *Jurnal Demokrasi*. Vol. VI, No. 2, Oktober 2007.
- Yunus, Yasril. 2008. "Model Pemerintahan Nagari Dengan Pertimbangan: Nilai Demokratisasi (Otonomi Daerah dan HAM) dan Nation State". *Laporan Penelitian*. Padang: Universitas Negeri Padang
- Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 2 tahun 2008 tentang Nagari
- Perda Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Nagari.
- Perda Provinsi No 2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari